

Meeting date: March 05, 2026, 08:37 am

General Summary

- **Integrasi Data ASN:** Pengelolaan data jabatan jadi dasar layanan manajemen ASN dengan integrasi ke Kementerian Kesehatan dan Pendidikan.
- **Fitur Peta Jabatan:** Fitur cek kesesuaian dan replikasi jabatan memudahkan penanganan data OPD tanpa input manual.
- **Aturan Perubahan SOTK:** Aturan penambahan unit kerja harus melalui aplikasi untuk menjaga riwayat jabatan ASN.
- **Validasi Data Jabatan:** Pengisian data jabatan harus lengkap dan divalidasi agar tidak terjadi kesalahan.
- **Sinkronisasi Data:** Proses sinkronisasi antar layanan memakan waktu 30 menit sampai 4 jam, perlu dilakukan secara komprehensif.
- **Pengembangan Kompetensi ASN:** Integrasi data jabatan dan pelatihan bertujuan untuk pengembangan kompetensi yang lebih terarah.

Action items

BKD Provinsi Jawa Tengah

- Mendorong disiplin pengisian data peta jabatan dan peremajaan data pegawai agar data yang digunakan dalam sistem dapat akurat (00:59)

Abed Nega

- Menyampaikan hasil diskusi dan masukan ke pihak internal BKN dan instansi pembina terkait integrasi data dan validasi rumpun jabatan serta formasi jabatan fungsional (01:19)

OPD terkait

- Melakukan review dan pengisian lengkap InfoJab dengan cermat, hindari pengisian secara dicicil atau terburu-buru untuk mempercepat sinkronisasi data pada layanan lain (00:50)

OPD Rumah Sakit dan Dinas Sosial

- Melakukan koordinasi penempatan atasan struktural dan penyesuaian rumpun jabatan fungsional sesuai ketentuan serta melaporkan kendala ke BKD dan BKN bila terjadi gangguan sinkronisasi (01:07)

BKD dan BKN

- Memperbaiki dan menyempurnakan proses sinkronisasi data antar sistem (CISN Perencanaan, EMOTE, IMUT, E-Kinerja) agar data pejabat pensiun, formasi dan jabatan terupdate secara realtime (02:03)

Semua peserta

- Gunakan browser incognito saat mengoperasikan CISN Perencanaan untuk menghindari error akibat cache yang menyebabkan data rumpun jabatan tidak muncul (01:52)

BKD/BKN

- Membuat fitur rekapitulasi pengisian formasi dan kebutuhan ASN per OPD yang bisa diunduh secara berkala untuk validasi internal (00:59)

BKD/Pihak terkait

- Koordinasi lanjutan untuk mengakomodasi kebutuhan SDM khusus yang belum terakomodasi dalam peta jabatan seperti psikolog dan caregiver pada Dinas Sosial (01:13)

Notes

Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan ASN

- Fokus utama adalah penguatan integrasi data dan fitur dalam aplikasi CISN Perencanaan untuk mendukung akurasi dan efektivitas manajemen ASN di Jawa Tengah.
- **Integrasi Data dan Sistem Perencanaan ASN (12:43)**
 - Pengelolaan data jabatan dan peta jabatan menjadi dasar seluruh layanan manajemen ASN, mulai dari evaluasi kinerja hingga mutasi.
 - Sistem sudah terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan dan Pendidikan untuk data fasilitas kesehatan dan sekolah.
 - Fitur rekomendasi redistribusi pegawai akan diluncurkan bulan depan untuk melihat kebutuhan dan anggaran jabatan secara detail.
 - Integrasi data dengan instansi pembina dan sistem lain dilakukan melalui API dengan proses sinkronisasi maksimal 3-4 jam.
- **Fitur Unggulan untuk Penyusunan Peta Jabatan (21:13)**

- Fitur replikasi jabatan fungsional dan pelaksana memudahkan penyalinan data jabatan di berbagai OPD tanpa input manual berulang.
- Import data jabatan dari kementerian pembina sudah dapat dilakukan untuk VASKES dan satuan pendidikan yang valid.
- Fitur cek kesesuaian kebutuhan jabatan fungsional secara otomatis membandingkan data peta jabatan dengan rekomendasi pembina.
- Tombol ubah atasan struktural dipindahkan ke aksi tiap jabatan untuk mengurangi kesalahan input.
- **Aturan dan Penanganan Perubahan SOTK (19:04)**
 - Penambahan dan penghapusan unit kerja harus dilakukan melalui aplikasi secara langsung, tidak melalui edit nama biasa untuk menjaga riwayat jabatan ASN.
 - Perubahan nama unit harus membuat unit baru, bukan mengedit unit lama agar riwayat jabatan ASN tetap terjaga.
 - Untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan, perubahan atasan struktural cukup dilakukan tanpa mengubah unit kerja jika tidak ada perubahan regulasi.
- **Pentingnya Pengisian Data Lengkap dan Validasi Info Jabatan (44:23)**
 - Pengisian informasi jabatan harus lengkap dan bisa dilakukan secara manual atau impor template Excel dengan validasi agar tidak terjadi error data.
 - Validasi pengisian info jabatan wajib dilakukan agar data terbaca dan progres pengisian bisa dipantau.
 - Fitur cetak draft peta jabatan tersedia dalam bentuk PDF per jabatan untuk memudahkan review dan pelaporan.

Strategi Sinkronisasi dan Penanganan Kendala Teknis

- Penyempurnaan sinkronisasi data antar layanan dan penanganan masalah teknis aplikasi menjadi prioritas untuk kelancaran proses manajemen ASN.
- **Proses Sinkronisasi Data Antar Layanan (50:10)**
 - Sinkronisasi data antar layanan perencanaan dan layanan lain (seperti e-mote dan IMUT) membutuhkan waktu antara **30 menit sampai 4 jam** tergantung jenis layanan.
 - Sinkronisasi harus dilakukan sekaligus dan lengkap untuk menghindari antrean berulang yang memperlambat update data.
 - Bila data sudah muncul di layanan perencanaan tapi belum muncul di layanan lain, disarankan koordinasi dengan pengelola layanan di instansi terkait.

- **Penentuan Atasan Struktural dan Dampaknya pada Penilaian Kinerja (53:11)**
 - Penentuan atasan struktural fleksibel, bisa di bawah Sekda atau Gubernur, sesuai SOTK dan kebijakan instansi.
 - Penempatan di bawah Gubernur langsung menyebabkan penilaian kinerja dilakukan oleh Gubernur, begitu juga jika di bawah Sekda maka Sekda yang menilai.
 - Penyesuaian ini penting agar fungsi penilaian kinerja dalam sistem BKN dapat berjalan sesuai struktur organisasi.
- **Kendala Teknis pada Fitur Replikasi Jabatan dan Koneksi Sistem (01:02:23)**
 - Fitur replikasi jabatan belum dapat menampilkan semua OPD jika data unit kerja belum terdaftar atau koneksi lambat.
 - Koneksi internet yang tidak stabil dan penggunaan jaringan bersama dapat menyebabkan gangguan akses dan sinkronisasi layanan.
 - Pengelola disarankan cek koneksi dan koordinasi dengan PIC layanan bila terjadi gangguan berulang.
- **Ketidaksesuaian Data di Sistem IMUT dan Sinkronisasi UNOR (02:03:01)**
 - Data UNOR yang sudah non-aktif masih muncul di layanan IMUT, padahal sudah tidak aktif sejak beberapa waktu lalu.
 - Perubahan pejabat yang sudah pensiun belum tercermin dengan baik di sistem IMUT, menyebabkan data tidak sinkron.
 - Koordinasi dengan tim pengelola IMUT diperlukan untuk memperbaiki sinkronisasi data agar valid dan up to date.

Pemanfaatan Data Perencanaan untuk Pengembangan Kompetensi dan Formasi Jabatan

- Perencanaan jabatan dan formasi diharapkan menjadi dasar pengembangan kompetensi dan penetapan kebutuhan SDM yang terarah.
- **Integrasi Data Perencanaan dengan Pengembangan Kompetensi ASN (29:22)**
 - Data peta jabatan dan kualifikasi akan diintegrasikan dengan layanan pengembangan kompetensi agar pelatihan lebih terarah dan tidak sporadis.
 - Rencana implementasi integrasi ini ditargetkan mulai bulan depan agar pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan.
 - Data formasi yang akurat akan membantu menentukan kebutuhan pelatihan yang relevan berdasarkan kualifikasi jabatan.
- **Pengisian Formasi Jabatan Fungsional dan Pelaksana Sesuai Aturan (35:56)**

- Pengisian formasi harus sesuai dengan dokumen penetapan dan rekomendasi dari instansi pembina, terutama untuk jabatan fungsional dan pelaksana.
- Sekolah negeri dan fasilitas kesehatan sudah diperbarui datanya, sedangkan sekolah swasta tidak bisa diinput karena belum diatur dalam regulasi.
- Penambahan role operator SOTK dan InfoJob memungkinkan pengelolaan formasi dan informasi jabatan sesuai tugas masing-masing instansi.
- **Tantangan Pengisian Formasi di Jabatan Kesehatan dan Sosial (01:21:47)**
 - Kebutuhan jabatan kesehatan di panti sosial masih dalam proses integrasi dengan data Kementerian Kesehatan.
 - Jabatan pekerja sosial di Dinas Sosial menghadapi kendala karena aturan pembina yang hanya mengakomodasi formasi existing.
 - Perlu koordinasi berkelanjutan dengan instansi pembina untuk penetapan kebutuhan formasi baru dan validasi data jabatan.
- **Penyesuaian Formasi dan Kualifikasi Jabatan Sesuai Jenjang dan Rumpun (01:43:29)**
 - Sistem validasi formasi jabatan fungsional akan membandingkan jumlah kebutuhan di tiap OPD dengan penetapan MENPAN.
 - Untuk guru, rencana integrasi data per mapel dan jenjang akan memudahkan kenaikan jabatan tanpa terhambat kebutuhan mapel.
 - Penyesuaian kualifikasi jabatan pelaksana yang bersifat umum (S1/D4 semua jurusan) sedang dipertimbangkan untuk mengakomodasi fleksibilitas mutasi dan pengembangan kompetensi.

Pengaturan Rumpun Jabatan dan Validasi Data Jabatan

- Standarisasi rumpun jabatan dan pengisian data jabatan perlu diperhatikan agar data formasi dan validasi berjalan lancar.
- **Penerapan Multi-Tagging Rumpun Jabatan Fungsional (01:49:20)**
 - Rumpun jabatan fungsional mengikuti peraturan kementerian pembina dengan multi-tagging untuk mencerminkan beragam kontribusi jabatan.
 - Contohnya, jabatan Prakom di BKN memiliki rumpun ICT dan manajemen ASN sesuai tugas unit.
 - Belum ada pakem formal dari manajemen talenta terkait rumpun, sehingga digunakan rumpun “urusan pemerintahan” sebagai standar sementara.
- **Permasalahan Teknis Penggantian Rumpun Jabatan di Sistem CISON (01:47:53)**
 - Penggantian rumpun jabatan terkadang gagal karena error sistem atau cache browser.

- Disarankan menggunakan browser incognito untuk menghindari masalah cache saat pengeditan data rumpun.
- Sistem sudah mendukung pengisian lebih dari satu rumpun untuk satu jabatan.
- **Pentingnya Pengisian Lengkap dan Akurat Data Info Jabatan (01:56:31)**
 - Semua kolom data info jabatan penting, terutama ikhtisar jabatan, pendidikan, tugas pokok, dan syarat jabatan.
 - Pengisian lengkap membantu ASN baru memahami tugas dan kualifikasi jabatan tanpa harus bertanya ulang.
 - Fitur replikasi info jabatan direkomendasikan untuk memudahkan pengisian data seragam antar OPD.

Koordinasi dan Kebijakan Penyesuaian Jabatan di Lingkungan Pemprov Jawa Tengah

- Konsistensi struktur jabatan dan penilaian kinerja perlu disesuaikan dengan regulasi dan kebutuhan organisasi.
- **Penyesuaian Struktur Jabatan RSUD dan OPD di Bawah Gubernur (01:10:11)**
 - RSUD dan OPD yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur harus disusun agar penilaian kinerja dilakukan oleh Gubernur.
 - Koordinasi antara BKD, Biro Organisasi, dan OPD terkait penting untuk menyelaraskan struktur dengan perjanjian kinerja gubernur.
 - Penyesuaian ini juga untuk memenuhi kebutuhan sistem eKinerja yang tidak dapat melakukan setting manual penilai jabatan.
- **Kendala Pengisian Data Jabatan terkait Perubahan SOTK dan Sinkronisasi (02:04:09)**
 - Banyak kasus data pejabat pensiun belum diperbaharui di sistem eKinerja sehingga menyebabkan ketidaksesuaian data.
 - Sinkronisasi data antar layanan utama seperti SISN Perencanaan, SISN Utama, dan eKinerja perlu ditingkatkan agar data jabatan selalu mutakhir.
 - Pengelola didorong berkoordinasi dengan tim teknis layanan eKinerja untuk mempercepat resolusi masalah data.
- **Penguatan Peran BKD dalam Pengelolaan Data Jabatan dan Sinkronisasi (01:59:59)**
 - BKD diharapkan menjadi PIC utama untuk memastikan sinkronisasi data jabatan dan pengisian data dilakukan dengan disiplin.
 - Disiplin pengisian info jabatan dan remajakan data pegawai menjadi kunci agar sistem dapat mencerminkan kondisi riil organisasi.

- BKD juga berperan sebagai penghubung teknis antara OPD dan penyelenggara layanan sistem informasi.
- **Pentingnya Penyesuaian Kebijakan Formasi dengan Realita Lapangan (01:13:44)**
 - Dinas Sosial menyampaikan kebutuhan SDM teknis yang terus berkembang, seperti caregiver dan tenaga psikolog, yang belum sepenuhnya terakomodasi.
 - Realita pengisian formasi seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan karena keterbatasan anggaran dan kebijakan yang berlaku.
 - Masukan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan kebijakan kepegawaian di tingkat provinsi dan lebih tinggi.